

# POLRI

## DI TENGAH HARAPAN DAN TANTANGAN

Polri sering kali diobok-obok saat menjelang pelaksanaan pemilu. Ini semua menunjukkan bahwa Polri memiliki kelebihan dibanding institusi lain. Karena itu, diperlukan keberanian dari Polri untuk tetap berdiri tegak tanpa keberpihakan, meskipun semua parpol siap menderkam Polri.

**T**IDAK heran, jika bermunculan harapan dan juga ketakutan dari berbagai pihak, bahwa Polri akan bergoyang ke sana dan ke sini. Atau setidaknya, Polri akan condong ke parpol tertentu. Seperti diungkapkan Martti Ahtisaari, peraih nobel perdamaian mengharapkan TNI/Polri netral dan mengaman-

kan pelaksanaan pemilu legislatif di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

"Tugas TNI dan Polri sudah jelas diatur dalam undang-undang. Saya pikir harus dipahami dan penting untuk menjadikan semuanya jelas," kata Ahtisaari, di Banda Aceh. Hal tersebut menurut mantan Pre-

siden Finlandia itu penting karena pemilu yang aman dan damai memastikan bahwa proses perdamaian di Aceh berjalan dengan baik. Ketua Crisis Management Initiative (CMI) yang memfasilitasi nota kesepahaman (MoU) damai Helsinki itu juga mengaku tidak memfavoritkan partai politik peserta pemilu, tetapi memfavoritkan demokrasi. Menurut dia, yang penting adalah bagaimana mengamankan perdamaian dan pemilu mendatang berlangsung bebas tanpa kekerasan maupun intimidasi.

"Sekali lagi saya ingin mendengar



bagaimana komitmen TNI dan Polri untuk mengamankan pemilu di Aceh. Sebelumnya saya bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sudah berkomitmen Pemilu 2009 akan berjalan lancar," katanya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menegaskan sikap netral Polri dalam Pemilu 2009 mendatang. "Sikap kami dalam pemilu jelas netral," katanya. Sebagai aparat yang bertugas mengamankan jalannya pesta demokrasi lima tahunan tersebut, lanjutnya, pihaknya bersikap sama terhadap semua partai politik. "Kami menjaga agar pemilu dapat berlangsung secara aman, lancar dan damai," katanya. Menurut dia, dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat yang mengamankan Pemilu, pihaknya akan mengerahkan dua pertiga pasukan dari total 33.650 personel polisi di seluruh Indonesia.

Untuk itu, pihaknya akan selalu proaktif dengan selalu mengutamakan profesionalitas dan disiplin pribadi, menghindari kekerasan dan pelanggaran HAM, menjalin kerjasama dengan anggota TNI, departemen instansi terkait, dan komponen masyarakat serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepala Korps Brimob Polri, Brigjen Pol Imam Sudjarwo, menambahkan, tugas utamanya saat ini adalah bagaimana bisa menjalankan pemilu secara damai. "Kita mempunyai operasi untuk pengamanan Pemilu yang bernama Mantap Brata," jelasnya. Kapolri juga meminta, jajaran kepolisian di seluruh Tanah Air untuk menjalankan tugas pengamanan Pemilu 2009 tanpa memihak. "Pegang teguh komitmen netralitas dengan berdiri dia atas semua pihak tanpa memihak. Jangan pertaruhkan masa depan bangsa untuk kepentingan sesaat, karena itu laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab," katanya. Netralitas Polri, ditunjukkan dengan cara pelarangan penggunaan fasilitas milik Polri untuk Pemilu. Hampir semua pimpinan wilayah menyampaikan penegasan dari Kapolri tersebut.



Kapolda Jawa Barat (Jabar) Irjen Pol Timur Pradopo, menegaskan seluruh fasilitas, sarana dan prasarana Polri tidak boleh digunakan dalam pelaksanaan Pemilu, dan hal itu sebagai bukti netralitas Polri, yang harus diwujudkan. Kapolda merujuk pada pernyataan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada 11 Februari lalu, yang mencanangkan sukses pelaksanaan Pemilu 2009, sehingga seluruh unsur Polri perlu mengamatkannya. Pencanaan tersebut, kata dia, sangat strategis untuk menggelorakan seluruh masyarakat dalam mensukseskan Pemilu 2009. "Ini adalah momentum Polda Jabar untuk mengajak masyarakat dalam mengamankan Pemilu 2009," katanya. Mencermati perkembangan situasi dewasa ini, Timur Pradopo mengatakan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) cenderung menunjukkan adanya peningkatan, baik secara kualitas maupun kuantitas yang meliputi kejahatan konvensional, kejahatan trans nasional, kejahatan terhadap kekayaan negara serta kejahatan yang berimplikasi kontingensi. Kondisi tersebut, katanya, menuntut kesiapan sumberdaya manusia (SDM) Polri yang profesional, mahir, terpuji, dan patuh hukum dalam melaksanakan tugasnya selaku pemelihara Kamtibmas. Para bintanga Polri, yang merupakan

para pemuda dan pemudi yang terpilih dan memenuhi persyaratan untuk menjadi bintanga Polri, kata dia, kehadirannya di jajaran kepolisian mempunyai arti yang sangat penting. Sementara itu, pengamat politik dari Fisip Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit, menyatakan, jajaran kepolisian harus memenuhi janjinya untuk bersikap netral dalam Pilkada maupun Pemilu legislatif 9 April 2009 dan pemilihan presiden (Pilpres) mendatang. "Polri harus netral. Itu janjinya yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Kasus di Jatim, misalnya, indikasi bahwa polisi tidak netral," katanya, kepada pers usai diskusi Wacana 23 Agenda dari Sliipi bertema "Membangun Pemerintahan yang Kuat dan Efektif" di DPP Golkar Sliipi, Jakarta Barat, belum lama ini. Dia mengemukakan, intervensi Mabes Polri kepada Polda Jatim mengindikasikan bahwa pimpinan Mabes Polri berkepentingan terhadap Pilkada Jatim. Mabes Polri diduga berkepentingan agar calon yang didukung partai tertentu memperoleh kemenangan. "Pimpinan Polri di Mabes Polri kepentingan mencari muka sehingga Polri dibuat tidak netral. Karena itu, Mabes Polri kemudian mengintervensi agar calon yang didukung partai pemerintah memperoleh kemenangan," katanya. [joe]



FOTO: JETEIEVA

# TPS RAWAN DAN KESIAPSIAGAAN PENGAMANAN

**B**ERBAGAI timbulnya gangguan keamanan menjelang dan selama pelaksanaan kampanye, sangat dimungkinkan. Karena berbagai gangguan keamanan bisa berupa bermacam-macam bentuk. Terlepas dari bentuk gangguan keamanan yang ada, Polri telah memetakan pola gangguan dan penanganannya. Karena Mabes Polri memprediksi, sedikitnya terdapat 200 ribu tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2009 rawan terhadap gangguan keamanan. Dari 537 ribu TPS yang ada, 300 ribu TPS lebih dinyatakan aman sedangkan sisanya rawan 1 dan rawan 2.

Dari prediksi gangguan keamanan itu, menurut Kapolri Jenderal Pol Bam-

bang Hendarso Dhanuri, terhadap TPS yang dinyatakan aman maupun rawan, Polri telah menetapkan pola pengamanannya.

Menurut Bambang Hendarso, bagi TPS yang aman, pola pengamanannya adalah 2 banding 10 banding 4. Pola ini berarti, dua polisi dibantu 10 anggota Linmas untuk mengamankan 4 TPS.

Sedangkan TPS rawan satu, pola pengamanan adalah dua polisi dibantu 8 Linmas untuk pengamanan dua TPS. Untuk TPS rawan 2, pola pengamanannya adalah satu TPS diamankan dua polisi.

Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Irjen Pol Saleh Saaf menambahkan, kriteria TPS rawan tidak hanya

dilihat dari segi gangguan kriminalitas saja tapi juga faktor lain. Misalnya antara TPS tempatnya berjauhan sehingga butuh lebih banyak polisi untuk mengamankan. Atau ada TPS di pulau terpencil dan ombak laut besar sehingga butuh lebih banyak polisi untuk pengamanan," katanya. Bahkan, TPS yang berada di wilayah yang sebelumnya terjadi bentrokan antar desa juga dinyatakan sebagai rawan.

Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), sedikitnya 92 dari 408 TPS di kabupaten Aceh Selatan termasuk dalam kategori rawan keamanan. Jumlah TPS wan itu tersebar di 16 kecamatan. Menurut Kapolres Aceh Selatan, AKBP Awi Setiyono, 92 TPS yang masuk dalam

kategori rawan itu memiliki tiga unsur kerawanan yakni dilihat dari faktor geografis, tingginya angka kriminal dan suhu politik didaerah itu.

TPS yang dikategorikan rawan kriminal, geografis dan politik itu terdapat di Kecamatan Labuhan Haji Barat, Labuhan Haji Timur, Kluet Timur, Kluet Utara, dan Kecamatan Trumon. Sementara sebanyak 316 TPS lainnya juga masuk dalam kategori rawan namun masih dalam intensitas yang rendah.

Untuk mengamankan jalannya pelaksanaan pemilu ini, Kapolri mengakui, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso akan mengerahkan bantuan 26.000 personil untuk membantu tugas kepolisian. Di lapangan, nantinya akan dilakukan koordinasi antara Pangdam dengan Kapolda untuk bantuan pengamanan tersebut.

Sedang untuk pengamanan pemilu terutama di daerah rawan konflik, koordinasi dengan TNI menitikberatkan pada penegakan hukum. Untukantisipasi keamanan pemilu, lanjut dia, Polri sudah menggelar kekuatan dari sebelas jajaran Polda dan melakukan

rapat koordinasi dengan seluruh Polda. "Di setiap Polres, Polda, dan Mabes Polri ada satuan cadangan yang jumlahnya cukup besar, ratusan ribu personel kita siapkan," jelasnya.

Sedangkan khusus untuk daerah rawan seperti Papua, lanjut dia, Polri sudah menambah kekuatan dengan menambah satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob. Namun satuan yang cukup besar itu disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan pemilu bukan untuk melakukan penindakan.

Kepada seluruh personel Polri, Kapolri menekankan agar mereka melakukan pendekatan kepada partai politik untuk mentaati peraturan pelaksanaan kampanye pemilu dan menahan diri dari perbuatan destruktif. Para personel Polri juga diimbau untuk lebih mengutamakan tindakan preventif dan sebisa mungkin menghindari terjadinya bentrokan fisik di lapangan.

Bagi Polri, pengamanan bukan hanya dilakukan pada pelaksanaan kampanye dan pemilu saja. Polri juga telah menyiapkan pengamanan untuk pasangan capres dan cawapres yang akan mengi-

kuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2009.

Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira, pola pengamanan itu telah disiapkan. "Namun, pengamanan capres dan cawapres dari incumbent (yang sedang berkuasa saat ini) bukan oleh Polri tapi oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)," kata Abubakar. Ia mengatakan, pengamanan capres dan cawapres yang pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden akan dilakukan bersama-sama antara Paspampres dan Polri. "Polri mengamankan capres dan cawapres yang bukan incumbent atau mantan Presiden dan Wakil Presiden," katanya. Polri, lanjutnya, akan memberlakukan standar pengamanan maksimal bagi capres dan cawapres yang menjadi tanggungjawab pengamanannya. "Kalau terjadi sesuatu pada capres dan cawapres, maka yang bertanggungjawabkan yang mengamankan juga," ujarnya. [joe]



# POLRI EVALUASI PENGAMANAN PEMILU

**P**OLDA Metro Jaya akan mengevaluasi pola pengamanan pelaksanaan kampanye Pemilu 2009. Karena jumlah massa pada kampanye terbuka partai politik (parpol) tahun ini hanya sekitar 30 sampai 60 persen dari jumlah yang dilaporkan panitia penyelenggara.

Padahal, selama ini jumlah aparat Polda Metro Jaya sebagai aparat keamanan yang diturunkan ke lapangan tetap sesuai perhitungan dan eskalasi dari jumlah peserta yang akan hadir dalam kampanye sesuai yang dilaporkan panitia.

"Kami akan mengkaji pola pengamanan yang sudah ada, karena terlalu banyak personel di lapangan kan tidak efektif," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Wahyono, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, ada partai besar yang mampu mengerahkan massa dalam jumlah besar tapi jumlahnya juga tidak

sebesar yang dilaporkan. Paling banyak hanya 60 persen saja dari laporan.

Pihaknya, lanjut Wahyono, juga menemukan partai yang menggelar kampanye terbuka di dua lokasi namun terpaksa digabung menjadi satu lokasi karena massa yang datang tidak seperti yang diharapkan.

Padahal, Polda Metro Jaya telah menyiapkan personel yang diperkirakan cukup untuk mengamankan kampanye dengan jumlah massa seperti yang dilaporkan oleh panitia.

Personil yang semula ditugaskan untuk mengamankan kampanye namun ternyata tidak jadi bertugas maka akan dikerahkan untuk memperkuat patroli di kawasan pemukiman dan tempat-tempat yang rawan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat.

"Dengan demikian, semua polisi tetap bertugas mengamankan Jakarta baik yang terlibat pengamanan pemilu maupun pengamanan rutin," katanya.

Perubahan pola pengamanan kam-

panye, menurutnya, dilakukan karena operasi untuk pengamanan pemilu secara keseluruhan berlangsung selama sembilan bulan sehingga perlu ada efektivitas sumber daya yang ada.

Dari Bandung diinformasikan, evaluasi delapan hari Kampanye Pemilu 2009, pada 16-23 Maret 2009 di seluruh Provinsi Jawa Barat aman, kondusif dan nyaris tanpa pelanggaran yang mencolok.

Kapolda Jabar Irjen Pol Timur Prado, mengungkapkan, kampanye selama ini kondusif, Polda Jabar belum menerima laporan pelanggaran-pelanggaran yang berat. "Mudah-mudahan saja kondisi ini berlangsung hingga pemilu beres," katanya.

Polda Jabar, lanjutnya, tetap menyiapkan kesiagaan untuk mengantisipasi kondisi terburuk mulai dari tahapan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara hingga pelaporan surat suara ke komisi pemilihan umum (KPU).

"Polda tetap antisipasi kondisi terburuk, semua simpul kerawanan sudah diminta siaga dan 'all out' mencermati gejala-gejala yang mengarah destruktif," kata Kapolda.

Sementara itu untuk pengamanan Pemilu 2009, Polda Jawa Barat juga mengedepankan kerja sama sinergis dengan Satgas-Satgas partai politik untuk melakukan pengamanan kampanye. [joe]



FOTO: ISTIMEWA



# TERTIB LALU LINTAS KAMPANYE PEMILU TAHUN 2009

Demi mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, dihimbau kepada peserta kampanye Pemilu Tahun 2009 dan masyarakat untuk:

- A. MEMATUHI PERATURAN LALU LINTAS
- B. DILARANG MENGANGKUT PENUMPANG DI ATAS ATAP/KAP KENDARAAN
- C. DILARANG MENGGUNAKAN KENDARAAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA.
- D. PENGENDARA SEPEDA MOTOR TIDAK BERBONGCENGAN LEBIH DARI 2 ORANG, WAJIB MENGGUNAKAN HELM, TIDAK MEMBUKA SARINGAN KEMALU, TIDAK MENUTUP SELURUH BADAN JALAN YANG ADA DAN TETAP BERADA DI JALUR KIRI.
- E. DILARANG MENGGUNAKAN ROTATOR DAN SIRINE
- F. TIDAK MEMARKIR KENDARAAN YANG DAPAT MENIMBULKAN KEMACETAN LALU LINTAS.
- G. TIDAK MENKONSUMSI MINUMAN KERAS DAN MABUK-MABUKAN
- H. TIDAK MEMBAWA SENJATA API DAN SENJATA TAJAM YANG MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN DIRI SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN.
- I. PENGEMUDI DAN PEMILIK KENDARAAN AKAN DIMINTA PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KESELAMATAN PENUMPANGNYA.

Pelanggaran terhadap hal tersebut di atas, akan dilakukan tindakan hukum dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ditlantis Polda Metro Jaya



# HASIL PEMILU LEGISLATIF 2009

9 APRIL 2009

tags: *hasil pemilu 2009, hasil penghitungan suara, lembaga survei, pemilu 2009, pengumuman resmi, quick count*

Laporan "Hasil Pemilu Legislatif 2009" ini akan terus di-update mengikuti perkembangan hasil penghitungan suara berdasarkan pengumuman resmi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan quick count dari lembaga-lembaga survei. Silakan nanti kembali lagi ke [sini](#) untuk mengikuti perkembangannya.

## HASIL SEMENTARA PEMILU 2009

SUMBER: KPU  
KAMIS, 23/04/2009 07:35 WIB

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1	Demokrat	2.897.740	20.608%
2	Golkar	2.049.374	14.625%
3	PDIP	1.966.268	14.032%
4	PKS	1.142.558	8.154%
5	PAN	875.777	6.25%
6	PPP	745.209	5.318%
7	PKB	716.844	5.116%
8	Gerindra	603.876	4.309%
9	Hanura	508.503	3.629%
10	PBB	262.041	1.87%
11	PKPB	215.183	1.536%
12	PKNU	211.957	1.513%
13	PDS	163.170	1.164%
14	PPRN	161.802	1.155%
15	PBR	163.413	1.095%
16	PKPI	129.235	0.922%
17	PDP	127.055	0.907%
18	PPPI	102.805	0.734%
19	Barnas	97.400	0.695%
20	PDK	87.232	0.623%
21	PPD	83.290	0.594%
22	RepublikaN	76.831	0.548%
23	PNBK	68.269	0.487%
24	Patriot	64.575	0.461%
25	PMB	55.740	0.398%
26	Kedaulatan	54.869	0.392%
27	PPI	51.004	0.364%
28	Pelopor	42.299	0.302%
29	PNI M	41.796	0.298%
30	PIS	41.512	0.296%
31	PPIB	38.553	0.275%
32	PKDI	36.088	0.258%
33	Partai Buruh	36.039	0.257%
34	Pakar Pangan	35.674	0.255%
35	PPDI	23.656	0.169%
36	PPNUI	20.416	0.146%
37	PSI	19.099	0.136%
38	Merdeka	15.827	0.113%
	JUMLAH	14.012.979	100%

## PERHITUNGAN QUICK COUNT

RANKING	PENYELEN GARA SURVEI							
	LSI (1)		LSN		LSI (2)		CIRUS	
1	Demokrat	20,46%	Demokrat	20,22%	Demokrat	20,34%	Demokrat	20,61%
2	PDIP	14,41%	Golkar	14,79%	Golkar	14,85%	Golkar	14,57%
3	Golkar	13,98%	PDIP	13,98%	PDIP	14,07%	PDIP	14,26%
4	PKS	7,84%	PKS	7,37%	PKS	7,82%	PKS	7,45%
5	PAN	5,74%	Gerindra	6,51%	PAN	6,07%	PAN	5,8%
6	PPP	5,23%	PPPP	5,33%	PPP	5,29%	PKB	5,63%
7	PKB	5,18%	PAN	4,97%	PKB	5,20%	PPP	5,31%
8	Gerindra	4,59%	PKB	4,62%	Gerindra	4,20%	Gerindra	4,27%
9	Hanura	3,72%	Hanura	3,43%	Hanura	3,49%	Hanura	3,5%
10	PKNU	1,45%	PKNU	1,85%	PBB	1,65%	PBB	1,87%
11			PBB	1,83%	PKPB	1,55%	PKNU	1,58%
12			PKPB	1,36%	PKNU	1,37%	PKPB	1,52%
13			PDS	1,19%	PDS	1,31%	PDS	1,46%
14			PBR	1,07%	PBR	1,29%	PBR	1,18%
15			PDP	1,03%	PPRN	1,14%	PPRN	1,11%
16			PPRN	0,85%	PKPI	0,99%	PKPI	0,91%
17			PDK	0,72%	PDP	0,84%	PDP	0,87%
18			PPPI	0,65%	Barnas	0,81%	PPPI	0,72%
19			Patriot	0,65%	PPPI	0,69%	Barnas	0,66%
20			PKPI	0,62%	PRN	0,64%	RepublikaN	0,60%
21			RepublikaN	0,59%	PPD	0,63%	PDK	0,58%
22			Barnas	0,52%	PDK	0,59%	PPD	0,56%
23			PNBK	0,52%	Patriot	0,57%	Patriot	0,45%
24			PPD	0,5%	PNBK	0,49%	PNBK	0,43%
25			PKDI	0,48%	Pakar Pangan	0,44%	P Kedaulatan	0,43%
26			PMB	0,46%	P Kedaulatan	0,41%	PPI	0,41%
27			PIS	0,4%	Pelopor	0,40%	PMB	0,38%
28			P Kedaulatan	0,39%	PMB	0,35%	Pelopor	0,32%
29			PPI	0,38%	PKDI	0,35%	PKDI	0,32%
30			PNI Marhaen	0,38%	PNI Marhaen	0,34%	PIS	0,32%
31			Pakar Pangan	0,35%	PPI	0,34%	Pakar Pangan	0,31%
32			Partai Buruh	0,33%	PIB	0,29%	PNI Marhaen	0,29%
33			PIB	0,32%	PIS	0,29%	PPDI	0,25%
34			PPDI	0,31%	PPDI	0,23%	Patai Buruh	0,24%
35			Pelopor	0,3%	Partai Buruh	0,22%	PIB	0,23%
36			Partai Merdeka	0,26%	Partai Merdeka	0,17%	PPNU	0,16%
37			PSI	0,25%	PSI	0,17%	Partai Merdeka	0,11%
38			PPNUI	0,24%	PPNUI	0,13%	PSI	0,11%

**Keterangan:**

**LSI (1):** Lembaga Survei Indonesia **LSN :** Lembaga Survei Nasional **LSI (2) :** Lingkaran Survei Indonesia  
**CIRUS :** CIRUS Surveyors Group

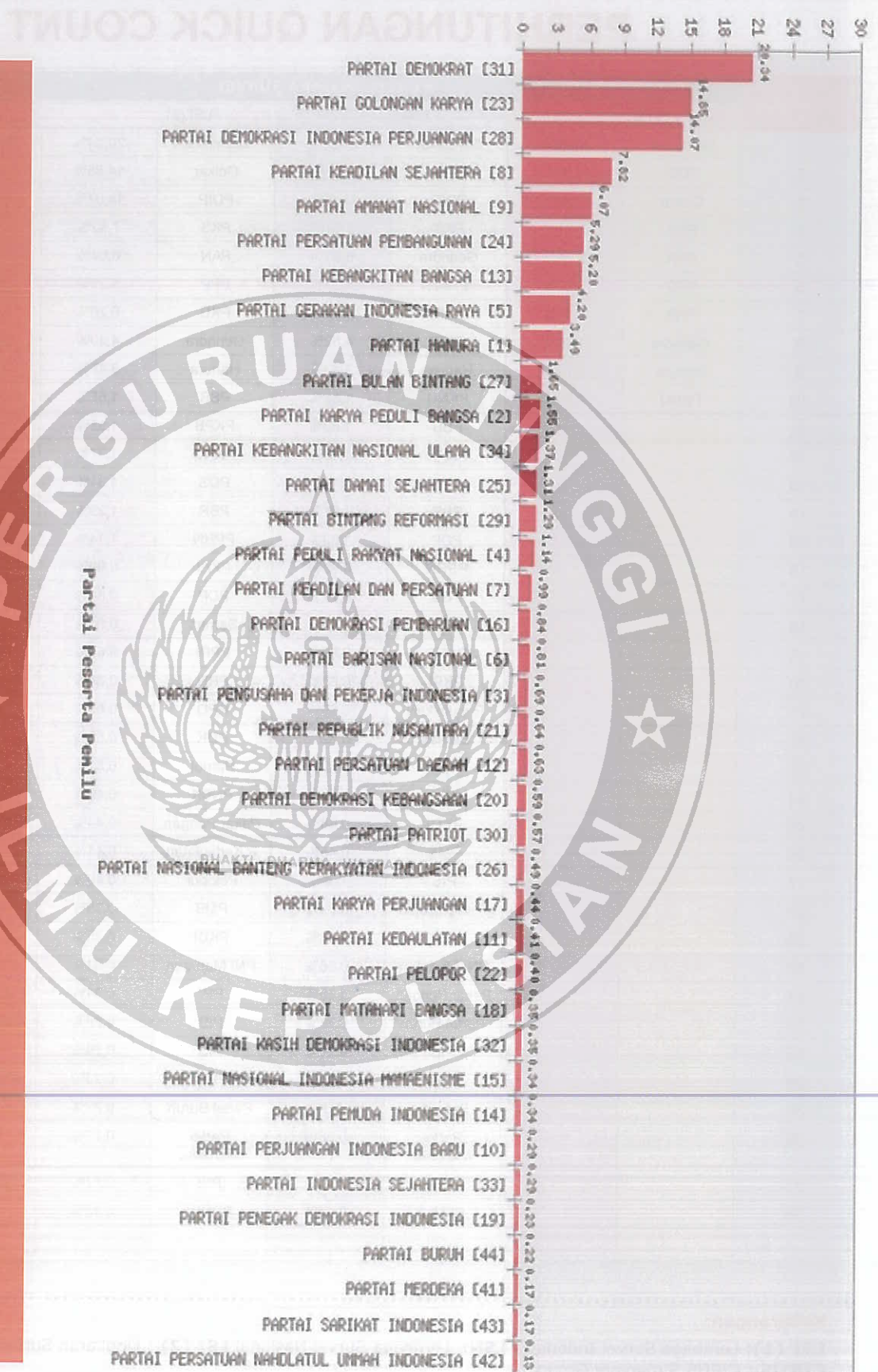


## Hasil Perhitungan Sementara Pemilu 2009

Berdasarkan Perhitungan Quick Count Lingkaran Survei Indonesia Data Perhitungan Mencapai 95,95%: -----

----- Jadwal Penetapan Hasil (Final) Pemilu 2009:

1. KPU Kabupaten/Kota Menetapkan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota. 19 April 2009
2. KPU Provinsi Menetapkan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi. 24 April 2009
3. KPU Menetapkan hasil pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional. 9 Mei 2009
4. Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU. 10-12 Mei 2009



9 APRIL 2009 YANG LALU, KITA BARU SAJA MELAKUKAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF. BANYAKNYA CALEG DAN PARTAI-PARTAI YANG IKUT DALAM PEMILU INI MELAHIRKAN BERBAGAI KOMENTAR MASYARAKAT, BERIKUT PENDAPAT MEREKA TENTANG KAMPANYE DAN PEMILIHAN CALON LEGISLATIF KALI INI.

## YANWAR KARYAWAN SWASTA

**PEMILU PUTARAN PERTAMA** untuk tahun ini relatif aman, itulah yang saya rasakan pada kampanye pemilu kali ini. Tidak ada gangguan yang berarti, karena saya yakin TNI dan Polri telah mempersiapkan diri untuk pengamanan ini dengan matang. Untuk pemilihan anggota caleg dari parpol, saya sangat optimis mereka bisa meyalurkan aspirasi rakyat untuk Indonesia yang lebih baik.



## EEN IBU RUMAH TANGGA



**JUJUR SAJA**, melihat banyaknya partai yang ikut pemilu kali ini membuat saya bingung, harus memilih yang mana. Masing masing partai membawa janji-janji yang sangat menggiurkan masyarakat, dan banyaknya para caleg yang diajukan oleh parpol justru semakin membuat

bingung karena banyak para caleg yang kurang banyak diketahui atau dikenal oleh masyarakat terutama dalam hal kemampuannya. Sebagai ibu rumah tangga, yang saya harapkan dari para caleg ini adalah bisa membawa keinginan masyarakat dan menjadikan negeri ini maju dan aman, terutama dibidang ekonomi, yaitu murahnya harga sembako.

## SRI KARYAWAN



**KAMPANYE KALI INI** cukup aman, walaupun partainya banyak dan membingungkan namun relative aman yang saya rasakan. Pemilu kali ini saya sedikit merasa pesimis untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di kursi DPR, DPRD dan

DPD. Jujur saja, melihat para caleg, saya kurang yakin dengan kemampuan mereka untuk bisa menyampaikan suara kami, masyarakat. Karena banyak sekali caleg yang terlihat masih muda dan kurang matang, sehingga terkesan mereka hanya ingin ikut meramaikan, tanpa membawa visi misi yang jelas bagi kemajuan rakyat.